



**Profil Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Tradisional
Untuk Penyediaan Data Program Pemberdayaan Sosial
Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Nelayan
Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara**

***Socio-Economic Profile of Traditional Fisherman Families for
Provision of Data on Coastal Community Socio-Economic
Empowerment Programs in Nelayan Villages, Medang Deras
District, Batu Bara Regency***

Dara Aisyah¹⁾, M. Sontang²⁾, Supsiloi³⁾

1) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut. Potensi tersebut tidak membuat nelayan tradisional kaya, namun kemiskinan nelayan tradisional masih menjadi masalah utama, mereka tetap tidak bisa sejahtera. Pemerintah telah memikirkan berbagai program agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama untuk keluarga nelayan miskin. Berbagai program telah di rancang dan dilaksanakan sejak masa Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi, namun didapati tidak dapat meningkatkan taraf sosial ekonomi kehidupan mereka. Keluarga nelayan tradisional masih miskin di Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Kajian ini bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam penyediaan data profil sosial ekonomi keluarga nelayan tradisional. Selama ini banyak bantuan program telah diberikan, namun tidak tepat sasaran. Permasalahan tersebut disebabkan karena belum tersedianya data yang akurat di setiap Kelurahan atau desa, tempat nelayan berada. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja program yang dilakukan sebelumnya, maka diperlukan perbaikan data agar dapat menentukan pilihan peserta program dengan tepat. Responden di ambil dengan random sebanyak 129 orang diwawancarai dengan menggunakan kuesioner, di desa Pakam, Pematang Eru, Benteng, dan Kuala Perai di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara. Kajian deskriptif dengan metode survei, dilakukan di sekitar pantai desa nelayan Kecamatan Medang Deras. Data dianalisis dengan menggunakan "Statistical Packages for the Social Science" (SPSS) versi 18.00. Kajian ini bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam menyediakan data profil sosial ekonomi keluarga nelayan miskin. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pihak Desa dalam memberikan data akurat dalam penentuan peserta program bantuan pemerintah, sehingga kinerja program pemerintah dapat tercapai.

Kata Kunci: Profil sosial ekonomi, nelayan tradisional, pemberdayaan sosial ekonomi

Abstract

Indonesia is a maritime country that has a wealth of marine natural resources. This potential does not make traditional fishermen rich, but the poverty of traditional fishermen is still the main problem, they still cannot prosper. The government has thought of various programs in order to improve the welfare of fishermen, especially for poor fishing families. Various programs have been designed and implemented from the time of President Soeharto to President Jokowi, but they are not found to be able to improve their socio-economic standard of life. Traditional fishing families are still poor in the Fisherman Village, Medang Deras District, Batu Bara Regency. This study aims to assist the Government in providing socio-economic profile data for traditional fishing families. So far, a lot of program assistance has been given, but it is not right on target. This problem is caused by the unavailability of accurate data in every Kelurahan or village, where the fishermen are located. Based on the results of the program performance evaluation conducted previously, it is necessary to improve the data in order to determine the choice of program participants correctly. Respondents were taken randomly as many as 129 people were interviewed using a questionnaire, in the villages of Pakam, Pematang Eru, Benteng, and Kuala Perai in the District of Medang Deras, Batubara Regency. Descriptive study using survey method, conducted around the coast of the fishing village of Medang Deras sub-district. Data were analyzed using "Statistical Packages for the Social Science" (SPSS) version 18.00. This study aims to assist the Government in providing data on the socioeconomic profile of poor fishing families. The results of the study are expected to assist the village in providing accurate data in determining the participants of the government assistance program, so that the performance of government programs can be achieved.

Keywords: Socio-economic profile, traditional fishermen, socio-economic empowerment.

How to Cite: Aisyah, D. Sontang, M. & Supsilani (2022). Profil Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Tradisional Untuk Penyediaan Data Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 8 (1): 59-74.

*Corresponding author:

E-mail: daisyah@usu.ac.id

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, dengan berbagai program yang bersifat holistik dengan tujuan memajukan tingkat sosial ekonomi penduduk. Program bertujuan membantu masyarakat yang tidak berdaya dan miskin, mengurangi pengangguran, meningkatkan tabungan dan lain-lain, khususnya masyarakat pesisir yang tinggal di pesisir pantai. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Isu kemiskinan menjadi perhatian karena berdampak pada meningkatnya kriminalitas, terjadinya stunting, pencemaran lingkungan, dan lainnya.

Kajian ini menyoroti kemiskinan terjadi di kalangan nelayan tradisional meskipun berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah. Pihak pemerintah harus memperbaiki sosial ekonomi nelayan, dengan mendesain berbagai keperluan nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapnya. Kemiskinan menjadi masalah utama dalam sektor perikanan, ciri kemiskinan seperti banyaknya tanggungan atau jumlah keluarga yang besar, taraf pendidikan rendah, kondisi rumah tidak memuaskan, tiada perbekalan dan tidak ada tabungan serta lemahnya iman (Abdul Malik et. al. 1996; Zainal 2006; Ibrahim dan Nor Hayati Sa'at, 2007; Turiman, et al. 2012) . Problematika lain bahwa nelayan Indonesia memiliki ketergantungan pada tauke karena terjerat hutang, tidak memiliki kapal karena

sulit mendapat bantuan kapal, biaya solar tinggi, permasalahan keuangan keluarga, kurangnya pengetahuan dan akses permodalan, serta biaya operasional nelayan untuk ke laut (Aisyah 2010; Aisyah 2012; Aisyah 2014; Aisyah 2021).

Komunitas nelayan golongan yang di belenggu dengan masalah kemiskinan, karena mereka sangat tergantung dengan hasil laut, Ketergantungan akan hasil tangkapan, sukar memberi keuntungan yang tinggi, di tambah dengan faktor ketidakpastian hasil tangkapan. Nelayan tradisional tidak ada kemahiran sehingga tidak mempunyai alternatif pekerjaan. Mereka bekerja hanya mengisi kesempitan hidup. Berbagai problematika di atas, disebabkan program belum berkesinambungan khususnya belum tertumpu bantuan pemerintah kepada nelayan tradisional (Aisyah 2014 dan Aisyah 2021). Banyak program belum tepat sasaran (Aisyah 2010 dan Aisyah 2012), dimana kajian menunjukkan bahwa penyediaan data sosial ekonomi belum tersedia sehingga penentuan peserta program tidak berbasis data.

Agar menjamin keberlanjutan program maka diperlukan tata kelola kolaboratif antara para pemangku kepentingan. Tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan sebagai instrumen yang menyatukan antara aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk masyarakat, dalam pengentasan kemiskinan. Upaya

strategis yang dapat dilakukan adalah dengan (1) mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk *non state actors*; dan (2) memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu peran aktif masyarakat juga harus di dorong dalam membentuk sistem ketahanan sosial di masyarakat (Riyanta dan Kurniati 2018).

Midgley (1995) menjelaskan melalui pendekatan individu, masyarakat dan adanya peran negara menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Pada dasarnya dari ke tiga strategi itu, yang paling penting dijalankan adalah peran, dimana negara diharapkan dapat melaksanakan berbagai upaya melalui berbagai program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan dengan mendayagunakan berbagai lembaga dan personel yang dimilikinya. Kebijakan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan belum menyentuh aspek fundamental dalam menurunkan angka kemiskinan.

Menurut Hans Singer (dalam Kian Wie, 1981) berbeda dengan pendekatanyang mengharapkan terjadinya efek menetes kebawah (*trickle-down effect*) maka pendekatan kebutuhan dasar menekankan pada pendekatan langsung dalam menangani masalah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar. Namun demikian dalam pelaksanaan pendekatan atau penyediaan kebutuhan dasar ini juga tidak

ada jaminan bahwa akan dapat didistribusikan secara adil dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat , khususnya masyarakat miskin. Narayan *et al.* (2000) menyatakan bahwa "*although the government's role in providing infrastructure, health, and education services is recognized by the poor, they feel their lives remain unchanged by government interventions*".

Dalam konteks konsep negara kesejahteraan maka kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara dan dipenuhi melalui mekanisme negara khususnya dengan melakukan redistribusi pendapatan negara melalui pemungutan pajak dan menyalurkan kepada program-program penjaminan kesejahteraan kepada warga negara lainnya. Keman (1993) menyatakan bahwa program-program kesejahteraan dan implementasinya telah menjadi ciri kegiatan produksi dan *supply* layanan publik oleh sektor publik dewasa ini khususnya pada negara-negara demokrasi industri maju. Oleh karena itu tidak meragukan lagi bahwa upaya-upaya pencapaian kesejateraan sosial dan ekonomi baik melalui upaya melahirkan kebijakan publik maupun penyediaan sumber-sumber pembiayaannya faktor utama yang berkontribusi kepada semakin membesarnya sektor publik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai, yaitu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun

belakangan ini. Kinerja program yang dikaji di sini sangat erat hubungannya dengan administrasi negara dan kebijakan publik. Administrasi negara dalam penelitian ini dihubungkan kepada suatu badan yang sangat berpengaruh dalam suatu negara yang bertindak melaksanakan kebijakan pembangunan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan ini diterjemahkan ke dalam bentuk program dan strategi pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, secara umum penelitian ini menjurus kepada bidang pembangunan masyarakat melalui pendekatan administrasi negara.

Aspek administrasi negara yang akan diberi perhatian yaitu mendata masyarakat pesisir pantai, serta mendata para nelayan yang mengetahui tentang program bantuan pemerintah dalam sektor perikanan. Institusi pemerintah di level pusat yang terlibat dengan nelayan adalah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Departemen ini merupakan suatu lembaga dalam pemerintahan pusat yang bertugas membuat kebijakan dan berpusat di Jakarta (Pemerintah Pusat). Pada dasarnya DKP bertugas menetapkan kebijakan, menentukan strategi dan seterusnya membentuk serta melaksanakan program untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi dalam kalangan masyarakat pesisir pantai.

Khusus di tingkat Propinsi, pengelolaan program untuk nelayan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Tingkat I. Bagi pelaksanaan

program di tingkat Kabupaten, adalah Suku Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Tingkat II bertugas sebagai pelaksana program. Adapun tindakan suku dinas tersebut, antara lain: mengawasi, mengatur dan mengelola pendataan termasuk data sosial ekonomi, data peralatan yang diperlukan untuk masyarakat pesisir pantai yang berada di daerah tersebut. Selain itu, suku dinas juga bertugas menyediakan prasarana dan memberikan pelayanan dalam berbagai bidang kehidupan untuk meningkatkan kinerja para nelayan. Hal ini termasuk kemudahan peralatan menangkap ikan, perahu dan minyak di samping pelayanan kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Efektifitas sesuatu program sangat bergantung kepada kesesuaian kebijakan, strategi dan program dengan sekumpulan masyarakat yang ditargetkan serta kinerja institusi pelaksana (Keban, 2004). Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan studi awal Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pembangunan Pangkalan Data di Desa Nelayan Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana profil sosial ekonomi keluarga nelayan di desa Nelayan, Kecamatan Medang Deras?

Kemiskinan disebabkan oleh kegagalan dari implementasi kebijakan sosial (Lauer dan Lauer 2002).

Ketidakseimbangan sosial menjadi penentu kepada ketimpangan ekonomi sementara ketimpangan ekonomi pula membantu mewujudkan ketidakseimbangan sosial. Kemiskinan melibatkan dua aspek utama iaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Para aktor yang terlibat dalam pembangunan harus melaksanakan program dengan berbagai kegiatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Shulman (1999) berpendapat kemiskinan terjadi akibat kegagalan aktor pembangunan dalam melaksanakan peranannya dalam membantu masyarakat meningkatkan pendapatan.

Para implementor program harus melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh dedikasi dan memiliki kinerja yang berkesan sehingga dipercaya masyarakat. Kelemahan yang menyebabkan kemiskinan sukar diatasi akhirnya membazirkan uang rakyat. Pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja program untuk menilai efektivitas program dalam pengentasan kemiskinan.

Masalah kemiskinan termasuk di Malaysia, masih lagi di anggap sebagai penyakit sosial yang sukar dihapuskan. Banyak cara telah dilakukan untuk menghapuskan kemiskinan termasuklah meningkatkan kemahiran, semangat bekerja dan produktiviti, perbaikan pendidikan, subsidi pertanian dan mewujudkan sistem kredit mikro. Berbagai kebijakan pembangunan yang meliputi aspek ekonomi dan sosial dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB)

(1971-1990), Rangka Rancangan Jangka Panjang Ke-2 (1991-2000) dan Rangka Rancangan Jangka Panjang Ke-3 (2001-2010) di Malaysia diperkenalkan bagi tujuan mengatasi masalah kemiskinan.

Selain itu, pemetaan kemiskinan telah disediakan di kawasan desa dan kota untuk membantu mendesain program pengentasan kemiskinan yang lebih baik. Satu pangkalan data kemiskinan negara diwujudkan untuk menambah baik kualitas data dan sistem informasi berkaitan dengan keluarga miskin. Pangkalan data ini merangkumi daftar kemiskinan desa dan kota. Walaupun kemiskinan telah berhasil dikurangkan, namun sektor pertanian dan perikanan masih lagi memiliki angka kemiskinan yang tinggi.

Kemiskinan masih wujud dalam kalangan nelayan walaupun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah. Kajian Abdul Malik et. al. (1996) mengenai program Kawasan Pembangunan Nelayan (KPN) di Malaysia yaitu program pembangunan bersepadu yang dijalankan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dilakukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dalam kalangan nelayan yang masih merupakan masalah utama dalam sektor perikanan, terutamanya di Pantai Timur Malaysia. Studi kasus dilakukan di tiga lokasi program KPN pantai timur. Seramai 300 peserta KPN di ambil sebagai responden kajian. Objektif KPN ialah untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat nelayan. Hasil kajian mendapati

program KPN telah lama berjalan namun kemiskinan tetap serius dan menjadi masalah utama dalam sektor perikanan. Antara ciri kemiskinan yang diketahui adalah banyaknya isi rumah dan tanggungan yang besar, taraf pendidikan yang rendah, keadaan rumah tidak memuaskan, kurang pemilikan modal, pkurang menikmati sarana dan prasarana dan tidak ada tabungan. Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan program KPN kurang berkesan kerana didapati tidak banyak keberhasilan yang boleh dibanggakan dalam kawasan yang terlibat dan tidak kelihatan perbezaan taraf hidup antara nelayan di KPN dengan nelayan dalam kawasan bukan KPN.

Usaha pemerintah Malaysia dalam mengatasi masalah kemiskinan, terutama dalam kalangan komuniti pesisir Pantai Timur Semenanjung Malaysia, telah menjalankan beberapa rencana pembangunan. Perencanaan dan implementasi program pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui organisasi publik yang ada, pada tingkat awal, aspek organisasi dalam pengelolaan program tidak begitu jelas. Pelaksanaan program oleh organisasi publik dalam tata kelola, didapati pengoperasiannya rumit dan tidak dapat dijalankan dengan berkesan. Pelaksanaannya perlu di dukung dengan pembentukan sistem yang sesuai dan komitmen pegawai yang terlibat serta bantuan teknologi informasi yang sesuai.

Kinerja program tergantung kepada kualitas pelayanan yang disediakan (Swanson & Holton 2005; Swanson 2007). Selain itu, ciri organisasi, kualitas sumber manusia, kebijakan dan tata kelola turut menentukan keberhasilan sesuatu program (Murphy & Cleveland 1995). Ada pula yang berpendapat bahwa kejayaan sesuatu program banyak tergantung kepada tujuan, struktur, dan tindakan pengurusan pada semua tingkat organisasi, proses dan pekerja (Rice & Arekere 2005). Pandangan ini di dukung oleh Rummler dan Brache (1995), juga Madron (1995). Jadi berdasarkan huraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan *output* dan *outcome* program yang baik, sistem organisasi harus di desain dengan baik sehingga dapat melancarkan proses dan hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan staf, maupun antara sesama pengurus. Pelaksanaan *ouput* dan *outcome* yang baik dapat menjamin kinerja program.

Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai melebihi 81,000 km. Potensi untuk memajukan wilayah pesisir cukup besar. Sebagai negara maritim, sumber lautnya cukup banyak. Jumlah desa di Indonesia adalah 67.439, terdapat lebih 9.261 desa pesisir pantai yang sebagian besar penduduknya miskin. Rata-rata masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir berpendapatan rendah, terpinggir dengan status pendidikan dan kesehatan yang serba kekurangan. Hal yang meningkatkan

kemiskinan di kalangan nelayan disebabkan karena ketergantungan berhutang untuk keperluan perahu, jaring, dan bahan bakar minyak (Kusnadi 2006, Aisyah et al, 2010, Basrowi 2019).

Tidak meratanya pembangunan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal menyebabkan adanya ketimpangan di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut telah menyebabkan banyaknya kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah akibat kesempatan kerja terbatas dan miskin (Aisyah et al, 2009).

Berdasarkan kenyataan dan kondisi yang terjadi dalam kalangan masyarakat pesisir di Indonesia, maka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka usaha tidak hanya ditumpukan kepada pemberdayaan sumberdaya alam (kelautan dan pesisir) tetapi juga sumberdaya manusianya. Kemajuan sumberdaya kelautan dalam hal ini perikanan, merupakan sasaran utama bagi memajukan kegiatan ekonomi dalam kalangan masyarakat pesisir (Aisyah et.al 2011).

Usaha pemberdayaan ekonomi nelayan harus dilakukan secara komprehensif serta holistik. Pembangunan secara komprehensif adalah pembangunan mencakup semua aspek. Untuk itu setiap sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Pembangunan yang komprehensif, menurut Asian Development Bank (2002), adalah pembangunan dengan memiliki ciri-ciri khusus termasuk: (1)

berbasis lokal, (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, (3) berbasis kemitraan, (4) secara holistik atau multi aspek, dan (5) berkelanjutan. Ciri-ciri holistik tersebut seharusnya dapat di ketahui melalui usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia, khususnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Memetakan kemiskinan merupakan pekerjaan penting agar kita tidak dibingungkan oleh wacana yang sering berkembang. Ada yang mengatakan bahwa nelayan itu miskin, bahkan termiskin di antara orang miskin (*the poorest of the poor*). Ada pula yang mengatakan bahwa nelayan tidaklah miskin. Buktinya ketika terjadi krisis, nelayan tenang-tenang saja. Bahkan, nelayan pulalah yang justru menikmati buah krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 itu. Mana yang benar? Bisa jadi nelayan Muara Angke itu tidak miskin, bila dibandingkan nelayan-nelayan suku laut di Riau. Bisa juga dikatakan nelayan Muara Angke miskin bila dibandingkan dengan pemilik kapal *long line* yang markasnya di Muara Baru. Di sinilah mulai terasa perlunya memahami apa itu kemiskinan. (Satria, 2015).

Pada era presiden Abdurrahman Wahid pemerintah Indonesia telah membentuk pengelolaan administrasi yang baru. Salah satunya adalah melalui pengelolaan dan penetapan kebijakan untuk memajukan masyarakat nelayan yang dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan

Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi administrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya organisasi yang mengurus perusahaan perikanan di Indonesia. Reformasi administrasi dalam sektor perikanan ini merupakan satu isu hangat sejak era presiden Soeharto sampai saat ini .

Menurut Nik Hashim (dalam Piei 1987) langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah masyarakat pesisir, hanya menyentuh aspek-aspek yang ada kaitannya dengan pembentukan institusi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan atau langkah-langkah yang menumpukan kepada persolan sosial ekonomi nelayan sebagai sumber penelitian. Usaha yang dilakukan seperti pemberian bantuan berupa modal atau sarana usaha untuk memajukan aktivitas perikanannya, dapat memperbaiki tingkat sosial melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk. Pada dasarnya Pemerintah sampai saat ini belum mampu memajukan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Pemerintah sebenarnya telah mengetahui permasalahan ini sejak lama, terutama di bawah kepemimpinan Soeharto, berbagai program untuk nelayan telah dilaksanakan. Sejak Orde Baru beberapa program pemberantasan kemiskinan seperti Program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), Program Instruksi Presiden untuk Desa

Tertinggal (IDT); Program Pengembangan Kecamatan; maupun Program Keluarga Sejahtera yang di rancang oleh Badan Keluarga Kecil Berencana Nasional (BKKBN). Bagaimana pun, sehingga kini permasalahan kemiskinan dalam kalangan masyarakat pesisir masih belum mampu diselesaikan.

Status sosial ekonomi keluarga nelayan di pesisir pantai Indonesia masih sangat ketinggalan dibandingkan dengan keadaan nelayan di Eropa Barat dan Jepang. Kemajuan sosial ekonomi nelayan di negara-negara maju cukup tinggi karena berbagai kemudahan infrastruktur telah disediakan. Sedangkan Dinas Perikanan dan Kelautan di Indonesia, belum serius mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat nelayan terutama kumpulan nelayan tradisional. Masalah itu berkaitan dengan tidak efisiennya kinerja program organisasi pelayanan perikanan dalam melayani masyarakat (Kurniawan 2005).

Berbagai masalah diatas memerlukan peranan administrasi negara dalam memberdayakan masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional agar kinerja program dapat ditingkatkan profesionalismenya terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat pesisir agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat nelayan.

Menurut Keban (2004), terdapat kesalahan yang sering dibuat oleh para penganalisis kebijakan termasuk pembuat kebijakan. Berkenaan dengan pelaksanaan program PSEMP yang dirancang pada

mulanya untuk membantu kaum nelayan miskin di kalangan masyarakat pesisir pantai, ternyata membawa berbagai masalah karena ketidakjelasan dalam menentukan siapa sebenarnya yang dikatakan masyarakat pesisir pantai yang sepatutnya perlu dibantu terlebih dahulu antara nelayan tangkap, penternak, pengolah ikan, petambak, atau pedagang ikan (Aisyah et al. 2011).

Pada dasarnya kesalahan dalam menentukan kelompok sasaran untuk program PEMP menjadi masalah yang krusial akibat kurangnya kemampuan para penganalisis dalam menentukan sasaran yang benar, atau mungkin ada unsur kesengajaan karena ingin memasukkan komunitas tertentu sebagai penerima program dengan menolak yang lain. Kurangnya data dan informasi yang lengkap tentang nelayan serta tidak adanya proses penglibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan atau keputusan sehingga masyarakat tidak dapat memberi input secara langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Tinjauan terhadap program PSEMP menunjukkan bahwa panyaluran dana program PSEMP yang dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dikatakan banyak yang tidak mengenai sasaran. Bahkan banyak dinikmati oleh pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Banyak masyarakat di luar nelayan, seperti guru, pemandu, bengkel mobil, bahkan pegawai pemerintah dikatakan turut menerima dana PSEMP

(Sinar Harapan, 2006). Pelaksanaan dan pengurusan PSEMP ternyata masih banyak kelemahan dan tidak mampu memecahkan masalah kemiskinan nelayan, termasuk di Kabupaten Batu Bara. Kabupaten Batu Bara sudah dimekarkan tujuh tahun dari Kabupaten Asahan, namun masyarakatnya rentan dengan kemiskinan, termasuk di Desa Nelayan Medang, Kecamatan Medang Deras. Oleh karena itu, perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pembangunan Pangkalan Data di Desa Nelayan Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara untuk menghasilkan suatu kebijakan, strategi dan program yang sesuai perlu di bentuk untuk menggantikan program yang tidak berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Survey. Pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Pertanyaan yang digunakan adalah berbentuk *semi-ended question* yang menggabungkan pertanyaan yang berbentuk *opened-ended* dan *closed-ended*.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nelayan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Penelitian dilakukan selama 1 tahun, tahun pertama dari Januari 2021-Desember 2021, pada tahun pertama peneliti melakukan survei persiapan data soSial ekonomi nelayan dalam rangkamembangun pangkalan data nelayan

untuk evaluasi program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Adapun pada tahun kedua yang akan dimulai pada Januari 2022-Desember 2022, melakukan pembangunan pangkalan data GIS masyarakat pesisir di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten BatuBara.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Nelayan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Desa Nelayan Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Adapun kriteria inklusi yaitu :

- a) Masyarakat Pesisir di Kecamatan Medang Deras
- b) Tidak bergabung dalam organisasi Nelayan
- c) Berprofesi sebagai nelayan tradisional
- d) Tidak pernah mengikuti program
- e) Bekerja sebagai nelayan sudah melebihi 5 tahun

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Bagi pengumpulan data primer berbagai teknik digunakan, termasuk melalui interview mendalam kepada key informant, kuesioner kepada responden, dan observasi. Data-data sekunder di peroleh secara triangulasi, dan dijadikan dasar untuk analisis data serta sebagai informasi tambahan.

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan menggunakan SPSS sedangkan pengolahan data key informant dan data-data yang di peroleh di analisis secara triangulasi .

Analisis Data

Data akan diolah dengan *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Informasi dari interview di olah untuk mendukung penemuan-penemuan dari analisis data kuesioner. Selain metode tersebut, metode pengamatan di lokasi penelitian juga digunakan untuk memperkuat penemuan penelitian.

Analisis Profil Sosial Ekonomi Dan Pandangan Nelayan Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Terhadap Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil kajian didapati bahwa daerah responden berada di Kecamatan Medang Deras, yaitu terdiri dari desa Medang dengan 2 dusun Kuala Sipare dan Pematang Eru). Adapun Desa Pakam terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Pematang Pasir dan Dusun Benteng. Dusun Pematang Eru adalah paling banyak nelayannya yang di ambil sebagai responden. Hasil kajian mendapati bahwa paling banyak responden bekerja sebagai nelayan, diman responden laki-laki yang paling banyak, dalam usia 20 - 40 tahun dengan masa bekerja rata-rata 15 - 21 tahun. Para nelayan rata-rata sudah menikah, memiliki rumah yang terdiri dari rumah batu dan papan.

Pendapatan nelayan rata-rata Rp 50.000 sehari, sehingga menurut mereka dengan pendapatan tersebut, di era pandemic covid ini kondisi ekonomi semakin tidak baik karena tidak dapat mencukupi segala perbelanjaan yang diperlukan, akhirnya mereka banyak terjerat hutang dan tidak dapat menabung. Apalagi para nelayan tidak memiliki alternatif pekerjaan karena tidak memiliki kemahiran, sedangkan rata-rata istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu terkait dengan kualitas hidup, para nelayan tidak dapat mencapai kualitas dengan baik, apalagi rata-rata tanggungan mereka ada 4 orang dalam satu rumah, dengan anak yang masih bersekolah dan belum ada yang bekerja. Hal tersebut dapat di lihat dari kualitas makanan yang tidak memiliki variasi dalam pemenuhan makanan sehari-hari. Tidak ada belanja pakaian, karena masih memenuhi belanja Pendidikan. Para nelayan rata-rata tidak mempunyai HP, karena di anggap mereka belum menjadi keperluan utama, dalam pelayanan kesehatan juga mereka belum mengutamakan, karena biaya tidak mencukupi, akibat lebih mengutamakan belanja makanan sehari-hari. Mereka merasakan selama covid kualitas hidup semakin tdk baik. Apalagi tidak ada jaminan keselamatan kepada para nelayan.

Sebenarnya menjadi nelayan bukan keinginan mereka, mereka memilih menjadi nelayan bukan karena minat, namun karena faktor kesempitan hidup, akibat mereka tidak mempunyai pilihan lain. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kesempitan hidup

yang mereka hadapi, mereka sangat memerlukan dukungan keagamaan.

Bantuan yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan mereka, karena pemerintah tidak memahami penyebab kemiskinan mereka, dan tidak pernah bertanya tentang bantuan yang mereka inginkan. Selain itu juga para nelayan sangat memerlukan dukungan moral, selain itu juga dukungan fisik seperti kapal dan alat tangkap sangat diperlukan. Para nelayan tidak pernah merasakan pelayanan dari pemerintah. Mereka sangat memerlukan kemahiran, karena para nelayan tidak pernah mengikuti pelatihan program yang diadakan pemerintah. Mereka merasakan bahwa pemerintah tidak ada memberikan kerja sama yang baik serta tanggung jawab dalam usaha mengurangi masalah nelayan.

Pada dasarnya pemerintah tidak mengenali nelayan, namun jika ada pemberian bantuan langsung sebagai peserta program baru pemerintah ada perhatian. Menurut mereka bantuan pemerintah dapat memberikan semangat, karena bantuan tersebut dapat meringankan bebanhidup para nelayan. Para nelayan tidak pernah didatangi Dinas Perikanan untuk memantau kegiatan pesisir mereka,

Menurut mereka bantuan yang diberikan pemerintah selama ini belum dapat membantu kerja nelayan, karena belum dapat meningkatkan motivasi mereka pergi ke laut. Pemerintah menurut mereka tidak membantu dalam penjualan hasil tangkapan nelayan. Para nelayan sangat mengharapkan bantuan

pemerintah diprioritaskan pada nelayan tradisional yang tergolong miskin. Harapan mereka bantuan keuangan dapat terus diprogramkan.

Para nelayan merasakan selama mereka bekerja, belum ada pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan datang melihat dan memantau kegiatan mereka di pesisir, apalagi berinteraksi secara tatap muka khususnya dalam memberikan arahan dan penerangan secara terperinci mengenai bantuan program pemerintah apalagi mendata keperluan mereka. Khususnya selama pandemic covid sampai saat ini belum ada Dinas yang datang memberikan bantuan, serta mendaftarkan mereka sebagai peserta penerima bantuan. Para nelayan rata-rata mengatakan Dinas Perikanan tidak serius dalam mengatasi masalah kemiskinan nelayan.

Seharusnya Dinas menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, terutama Dinas bertanggung jawab dalam mengurangi permasalahan nelayan agar para nelayan meningkat standar hidupnya. Para nelayan membutuhkan berbagai informasi dari Dinas. Pandangan para nelayan seharusnya Dinas bersikap adil terhadap semua peserta khususnya masyarakat pesisir.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian didapati bahwa daerah responden berada di Kecamatan Medang Deras, yaitu terdiri dari desa Medang dengan 2 dusun Kuala Sipare dan Pematang Eru. Adapun Desa Pakam terdiri dari 2 dusun yaitu

Dusun Pematang Pasir dan Dusun Benteng. Dusun Pematang Eru adalah paling banyak nelayannya yang di ambil sebagai responden. Hasil kajian mendapati bahwa paling banyak responden bekerja sebagai nelayan, dimana responden laki-laki yang paling banyak, dalam usia 20 - 40 tahun dengan masa bekerja rata-rata 15 - 21 tahun. Para nelayan rata-rata sudah menikah, memiliki rumah yang terdiri dari rumah batu dan papan. Pendapatan nelayan rata-rata Rp 50.000 sehari, sehingga menurut mereka dengan pendapatan tersebut, di era pandemic covid ini kondisi ekonomi semakin tidak baik karena tidak dapat mencukupi segala perbelanjaan yang diperlukan, akhirnya mereka banyak terjerat hutang dan tidak dapat menabung.

Apalagi para nelayan tidak memiliki alternatif pekerjaan karena tidak memiliki kemahiran, sedangkan rata-rata istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu terkait dengan kualitas hidup, para nelayan tidak dapat mencapai kualitas dengan baik, Hal tersebut dapat di lihat dari kualitas makanan yang tidak memiliki variasi dalam pemenuhan makanan sehari-hari. Tidak ada belanja pakaian, karena masih memenuhi belanja Pendidikan. Para nelayan rata-rata tidak mempunyai HP, karena di anggap mereka belum menjadi keperluan utama, dalam pelayanan kesehatan juga mereka belum mengutamakan, karena biaya tidak mencukupi, akibat lebih mengutamakan belanja makanan sehari-hari. Mereka merasakan selama covid kualitas hidup semakin tdk baik. Apalagi tidak ada jaminan keselamatan kepada para nelayan.

Sebenarnya menjadi nelayan bukan keinginan mereka, mereka memilih menjadi nelayan bukan karena minat, namun karena faktor kesempitan hidup, akibat mereka tidak mempunyai pilihan lain. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kesempitan hidup yang mereka hadapi, mereka sangat memerlukan dukungan keagamaan.

Bantuan yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan mereka, karena pemerintah tidak memahami penyebab kemiskinan mereka, dan tidak pernah bertanya tentang bantuan yang mereka inginkan. Selain itu juga para nelayan sangat memerlukan dukungan moral, selain itu juga dukungan fisik seperti kapal dan alat tangkap sangat diperlukan. Para nelayan tidak pernah merasakan pelayanan dari pemerintah. Mereka sangat memerlukan kemahiran, karena para nelayan tidak pernah mengikuti pelatihan program yang diadakan pemerintah. Mereka merasakan bahwa pemerintah tidak ada memberikan kerja sama yang baik serta tanggung jawab dalam usaha mengurangi masalah nelayan.

Menurut mereka bantuan yang diberikan pemerintah selama ini belum dapat membantu kerja nelayan, karena belum dapat meningkatkan motivasi mereka pergi ke laut. Pemerintah menurut mereka tidak membantu dalam penjualan hasil tangkapan nelayan. Para nelayan sangat mengharapkan bantuan pemerintah diprioritaskan pada nelayan tradisional yang tergolong miskin. Harapan mereka bantuan keuangan dapat terus diprogramkan.

Berdasarkan permasalahan sosial ekonomi nelayan tersebut, maka peneliti memberikan resolusi kepada Pemerintah untuk menerapkan pembangunan pangkalan data agar semua pendataan dapat tersimpan untuk penentuan data peserta program yang akan diajukan kepada pemerintah dalam penetapan daftar peserta program bantuan pemerintah di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan salah satu hasil dari Program Riset Talenta yang dibiayai oleh dana NON PNPB Universitas Sumatera Utara. Hibah Skema Penelitian Dosen Muda. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Rektor USU dan Lembaga Penelitian USU yang telah memberikan dana penelitian tahun 2021 Skema Mono Tahun Reguler.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Katiman Rostam, Abdul Hair Awang dan Ambar Teguh Sulistiyani (2009). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir: Suatu Kajian Di Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara. Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik 13 (2): 177-192.
- Aisyah, Katiman Rostam dan Abdul Hair Awang (2010). Prestasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Jakarta Utara, Indonesia: Satu penilaian awal GEOGRAFIA Online TM Malaysian Journal of Society and Space 6 (3):13-29
- Aisyah, Dara et al. (2011). Kemiskinan Nelayan di Kawasan Program Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR), Kuala Trengganhu. Pusat Pembangunan Sosioekonomi (CSD), Universiti Malaysia Terengganu.
- Aisyah, Dara (2012). Pembangunan Komuniti Nelayan dan Sumber Perikanan. Penerbit Universiti Malaysia Terengganu.
- Aisyah, Dara et., al., (2014). Social Welfare Development Program Among Coastal

- Community (SPKMP) in Kuala Terengganu : A Preliminary Assessment On The Performance Of The Program. *Journal Elixir Social Studies* 74 (2014) 27065-27071. ISSN : 2229-712x
- Aisyah, Dara & M. Sontang. (2021). Profil Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Untuk Pembangunan Pangkalan Data Program (Studi Awal Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir) Di Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Laporan Kemajuan Penelitian Talenta USU Skema Penelitian Dosen Muda FISIP USU
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) (2005) Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Jakarta.
- Direktorat PEMP - Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) (2006) Laporan Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) (2006) Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui keputusan Nomor SK.42/KP3K/VI/2006 Tentang Revisi Penetapan Kabupaten/Kota Penyelenggara Kegiatan PEMP.
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan (2006) Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Jakarta.
- Kusnadi. (2006). *Filosofi pemberdayaan masyarakat pesisir. bandung*. Humaniora Kusnadi.(2006). *Konflik sosial nelayan. Yogyakarta. LKIS pelangi aksara*
- Kurniawan (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaharuan.
- Ibrahim (2000). *Model Pembelajaran Kooperatif*. <http://id.wikipedia.org/wiki/>
- Aqib, Zainal (2006). *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Yrama Widya
- Turiman, P., Omar, J., Daud, A. M., & Osman, K. (2012). Fostering the 21st Century Skills through Scientific Literacy and Science Process Skills. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (59):110-116.
- Narayan, D., & Pritchett, L. (1999). Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania. *Economic Development and Cultural Change*, 47(4), 871-897.
- Riyanta, S., & Kurniati, P. (2018). Strategi tata kelola kolaboratif antara aktor pemerintah dan non pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2).
- Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Educational Researcher*, 2(15), 4 - 14.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Rice M, Arekere DM (2005) Workforce diversity initiatives and best practices in business and governmental organizations. In: Rice M (eds) *Diversity and public*

- administration: Theory, issues and perspectives. ME Sharpe, Armonk, New York.
- Rummler GA, Brache AP (1995) Improving performance: How to manage the white space in the organization chart (2nd ed.). Wiley John & Sons Inc, New York.
- Murphy, K. R., & Cleveland, J. N. (1995). Understanding Performance Appraisal: Social, Organizational, and Goal-Based Perspectives. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Wojnar, D. M., & Swanson, J. M. (2007). Phenomenology: An Exploration. Journal of holistic nursing.
- Swanson RA (1999) The foundations of performance improvement and implications for practice. In: Torraco R (Ed) Performance improvement theory and practice, pp. 1-25. BerrettKoehler, San Francisco.
- Swanson RA (2007) Analysis for improving performance: Tools for diagnosing organizations and documenting workplace expertise. 2nd edition. Berrett-Koehler, San Francisco.
- Swanson RA, Holton EF (1999) How to assess performance, learning, and perceptions in organizations. Berrett-Koehler, San Francisco.
- Swanson RA, Holton EF (eds) (2005) Research in organizations: Foundations and methods of inquiry. San Francisco, Berrett-Koehler.